

# Karakteristik dan Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas

## *Characteristics and Priority Factors Causing Slums in the Girlibanji Settlement Area (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Banyumas Regency*

Ricca Padyansari<sup>1\*</sup>, Murtanti Jani Rahayu<sup>1,2</sup>, Lintang Suminar<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi. e-mail: riccapadyansari@student.uns.ac.id

(Diterima: 14 Maret 2023; Disetujui: 14 April 2023)

### Abstrak

Pelaksanaan aktivitas yang terpusat pada kawasan perkotaan dapat mempengaruhi laju perpindahan penduduk menuju kota. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kawasan permukiman yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk kawasan hunian yang layak huni. Fenomena tersebut terjadi diantaranya di Kabupaten Banyumas seiring dengan terus berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas. Hal ini mengakibatkan munculnya kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Salah satu kawasan yang teridentifikasi permukiman kumuh adalah Kawasan Girlibanji. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya mengatasi permasalahan kekumuhan dengan penerapan beberapa kebijakan tetapi permasalahan permukiman kumuh belum teratasi sepenuhnya khususnya di Kawasan Girlibanji. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan penanganan permukiman kumuh dikarenakan belum diketahui faktor prioritas penyebab meningkatnya permukiman kumuh pada kawasan secara jelas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji adalah jaringan air limbah, kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan sistem persampahan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jaringan drainase.

**Kata kunci:** Analytical Hierarchy Process (AHP); faktor prioritas; Girlibanji; karakteristik; permukiman kumuh

### Abstract

Implementation of activities that are concentrated in urban areas affect the rate of population movement to cities. The continuous increase of urban population growth results in high demand for land for residential areas which is not comparable with the availability of land. The phenomenon occurs, among others, in Banyumas Regency, along with the continuing development of Purwokerto Urban Area as the capital of Banyumas Regency. This results in the emergence of slums in the Purwokerto Urban Area. One of the areas identified as slum settlements in Banyumas Regency is the Girlibanji Area. In dealing with slum areas, the Government of Banyumas Regency has tried to overcome the problem of slums by implementing several policies. However, the issue of slum settlements has not been fully resolved, especially in the Girlibanji Area. The failure to implement the slum management policy is due to the unknown priority factors causing the increase in slum settlements in the area. This research was conducted to determine the priority factors driving slums in the Girlibanji Settlement Area using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The priority factors causing slums in the Girlibanji Settlement Area are wastewater network, building density and quality, waste system network, income level, education level, and drainage network.

**Keywords:** Analytical Hierarchy Process (AHP); characteristics; Girlibanji; priority factors; slums

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan kota di negara berkembang berlangsung pesat karena kota mempunyai daya tarik yang kuat dan dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan di suatu kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat cepat menyebabkan lebih dari setengah populasi penduduk di Indonesia saat ini bermukim di daerah perkotaan. Menurut Badan

Pusat Statistik, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia menetap di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Laju urbanisasi penduduk yang sangat pesat dapat memberikan dampak pada suatu kota yaitu dapat menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan wilayah perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk terus meningkat mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kawasan permukiman. Menurut Akbar (2020), setiap manusia membutuhkan hunian yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat beristirahat sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu penting. Pengembangan kawasan permukiman di perkotaan bertujuan untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang nyaman, sejahtera, aman, layak huni, dan berkelanjutan. Akan tetapi, pengembangan kawasan permukiman di perkotaan tidak sebanding dengan semakin terbatasnya lahan di wilayah perkotaan untuk membangun kawasan hunian yang layak huni.

Pembangunan perkotaan dan tumbuhnya permukiman kumuh memiliki dampak yang besar bagi penurunan kualitas lingkungan. Peningkatan penduduk perkotaan yang cepat dan tidak diiringi dengan ketersediaan lahan serta pengadaan program-program pembangunan kota menjadi penyebab munculnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan (Wijaya, 2016). Kondisi tersebut menjadi salah satu isu dunia yang menjadi perhatian dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Menurut Suharto (2009), kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak, dengan penduduk yang memiliki pendapatan rendah serta lingkungan yang tidak sehat, bahkan memiliki risiko terhadap ancaman penyakit. Kawasan kumuh juga identik sebagai sumber masalah sosial, seperti tingkat kriminalitas yang tinggi. Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang tidak diharapkan keberadaannya. Terdapat berbagai macam faktor penyebab permukiman kumuh antara lain kepadatan bangunan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan kualitas hunian (Zulkarnaini, Elfndri, & Sari, 2019). Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab permukiman kumuh adalah fisik lingkungan dan lama tinggal penghuni (Surtiani, 2006).

Fenomena permukiman kumuh perkotaan juga terjadi di Kabupaten Banyumas, khususnya wilayah perkotaan Purwokerto yang dijuluki sebagai kota pendidikan dan kota perdagangan dan jasa. Purwokerto adalah kota dengan jumlah institusi perguruan tinggi paling banyak di wilayah Jawa Tengah bagian barat daya. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya industri nonformal seperti warung kelontong, *laundry*, jasa fotokopi, dan warung makan. Berkembang pula industri formal berupa pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan. Purwokerto sebagai kota perdagangan dan jasa ditandai dengan pembangunan gerai retail dan makanan secara terus-menerus. Purwokerto menjadi kawasan strategis dan penyumbang sektor ekonomi tertinggi ke-4 di Jawa Tengah sehingga memiliki potensi peningkatan jumlah penduduk tiap tahun. Berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas memberikan dampak munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660/630/Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas terdapat 115,7 hektar kawasan kumuh yang tersebar di Kawasan Perkotaan Purwokerto (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2020). Jumlah ini meningkat sebesar 69,28% dari tahun 2014 dimana pada tahun 2014 luas kawasan kumuh di Kabupaten Banyumas sebesar 69,58 hektar.

Permasalahan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto semakin berkembang, ditunjukkan dengan meningkatnya luasan kawasan kumuh seiring dengan perkembangan Kabupaten Banyumas. Salah satu kawasan yang teridentifikasi permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran–Kranji) yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh dataran rendah. Kawasan Girlibanji terletak pada pusat perkotaan yang rentan mengalami perkembangan kawasan sebagai dampak urbanisasi sehingga dijadikan kawasan yang diprioritaskan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya mengatasi permasalahan kekumuhan dengan penerapan beberapa kebijakan seperti perbaikan sarana prasarana dan perbaikan kualitas lingkungan tetapi permasalahan permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji belum teratasi sepenuhnya. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan penanganan permukiman kumuh dikarenakan belum diketahui faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman pada kawasan secara jelas. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji untuk memberikan bahan pertimbangan perencanaan kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk menjadikan permukiman yang lebih layak huni.

## **2. KAJIAN TEORI**

### **2.1 PERMUKIMAN**

Permukiman merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lingkungan hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal (Adisasmita, 2010). Lingkungan hunian perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan memiliki aksesibilitas ke

tempat kerja guna menunjang penghidupan sehingga fungsi kawasan dapat efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Merujuk dari definisi permukiman diatas, maka dapat diketahui bahwa kawasan permukiman berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Permukiman memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mendukung penghidupan dan fungsi kawasan.

Permukiman dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang merupakan kota atau desa atau bagian dari kota atau desa yang mempunyai fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal, tempat penduduk bermukim, bergerak, dalam kegiatan kerja dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi utama permukiman tidak hanya sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya tetapi juga sebagai tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Selain itu, perumahan juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dalam lingkungan terbatas (Sekatia, 2015).

## **2.2 PERMUKIMAN KUMUH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan kumuh adalah kawasan yang memiliki kualitas lingkungan secara fisik maupun nonfisik yang buruk dan kotor dengan keterbatasan ruang dan penduduk yang padat. Kondisi ini dapat membahayakan kehidupan manusia karena dapat mengarah pada kriminalitas dan kebakaran (Wiarni, Mononimbar, & Supardjo, 2018).

Permukiman kumuh adalah kondisi lingkungan tempat tinggal yang memiliki infrastruktur lingkungan yang tidak memadai, kualitas konstruksi bangunan yang kurang bagus, penduduk dengan pendapatan rendah dan sebagai pekerja sektor informal, tingkat pendidikan rendah, penduduk bersifat sementara dan tidak tetap, serta memiliki kualitas fisik lingkungan yang buruk. Kondisi permukiman kumuh yang tidak teratur dan padat serta ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai akan mengurangi nilai keindahan kota sehingga terlihat kumuh (Robaka, 2019). Permukiman kumuh sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul di kawasan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti alur pertumbuhan ekonomi yang terjadi sehingga berdampak pada munculnya kemiskinan. Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka akan memberikan dampak fisik maupun nonfisik pada lingkungan kawasan (Putra & Andriana, 2017).

## **2.3 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH**

Menurut Nawagamuwa & Viking (2003), keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya para penghuni permukiman tersebut. Karakteristik permukiman kumuh tercermin dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penampilan fisik bangunan temporer, tampak tak terurus maupun tanpa perawatan;
- b. Pendapatan penduduk yang rendah, yang mencerminkan status ekonomi masyarakat;
- c. Kepadatan bangunan yang tinggi, yang dapat terlihat dari tidak adanya jarak antarbangunan maupun tidak adanya *siteplan* yang terencana;
- d. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen;
- e. Sistem sanitasi tidak dalam kondisi yang baik;
- f. Kondisi sosial yang tidak baik, dilihat dengan banyaknya tindakan kriminalitas;
- g. Banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

## **2.4 TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH**

Tipologi permukiman kumuh ditentukan melalui identifikasi permukiman kumuh dengan melihat letak permukiman secara geografis. Dalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun (2018) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tipologi permukiman kumuh terdiri atas:

- a. Permukiman kumuh di atas air, berada di atas air, baik daerah pasang surut, sungai, rawa, ataupun laut;
- b. Permukiman kumuh di tepi air, berada tepi badan air (danau, waduk, pantai, sungai, dan sebagainya);

- c. Permukiman kumuh di dataran rendah, berada di daerah dataran rendah memiliki kemiringan lereng <10;
- d. Permukiman kumuh di perbukitan, berada di daerah dataran tinggi memiliki kemiringan lereng >10% dan <40%;
- e. Permukiman kumuh di daerah rawan bencana, terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi, dan banjir.

## 2.5 FAKTOR PENYEBAB KEKUMUHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN

Faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman ditentukan melalui proses sintesis teori dari beberapa ahli. Hasil sintesis teori akan digunakan sebagai variabel penelitian. Sintesis teori faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Faktor Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman**

Sintesis Teori	Variabel	Subvariabel
Keberagaman latar belakang dan struktur sosial akan mempengaruhi kualitas dan keharmonisan hubungan yang terjalin di lingkungan permukiman. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari tingkat pendidikan terakhir penduduk, jenis pekerjaan, migrasi masuk, <i>extended family system</i> , dan lama tinggal penghuni.	Faktor sosial budaya	Tingkat pendidikan Jenis pekerjaan Migrasi masuk <i>Extended family system</i> Lama tinggal penghuni
Minimnya penghasilan yang diperoleh penghuni permukiman kumuh. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung tidak mampu untuk mendirikan rumah yang layak huni dan memelihara kualitas lingkungan hunian.	Faktor ekonomi	Tingkat pendapatan
Permukiman kumuh menekankan pada kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan sistem persampahan, dan jaringan jalan. Permukiman kumuh cenderung tidak dilayani dan dijangkau oleh sarana dan prasarana yang memiliki standar layak dan memadai.	Faktor fisik lingkungan	Kepadatan dan kualitas bangunan Jaringan drainase Jaringan air bersih Jaringan air limbah Jaringan sistem persampahan Jaringan jalan

Sumber: Arung & Ulimaz (2021), Asa (2015), Crysta & Budisusanto (2017), Damisi, Kumurur, & Sela (2014), Fitri & Sulistinah (2021), Hariyanto (2007), Lestari & Sugiri (2013), Muvidayanti & Sriyono (2019), Putra & Andriana (2017), Putro (2011), Sari & Ridlo (2021), Surtiani (2006), serta Wimardana & Setiawan (2016)

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah tata cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi  
Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik kawasan secara langsung dan faktual.
- b. Kuesioner  
Kuesioner dilakukan terhadap responden ahli yang akan digunakan dalam analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). *Stakeholder* yang menjadi responden merupakan pihak yang memahami faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman. Ahli yang menjadi narasumber berasal dari instansi pemerintah, akademisi, serta masyarakat. Penentuan siapa saja ahli yang menjadi narasumber pengisi kuesioner ditentukan melalui analisis *stakeholder*. Menurut Reed et al. (2009), klasifikasi *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terbagi ke dalam empat golongan yaitu *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. *Stakeholder* yang dipilih dalam penelitian ini adalah *key player*, *subject*, dan *context setter*. *Stakeholder* terpilih untuk sebagai responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
- c. Wawancara  
Wawancara dilakukan secara semiterstruktur kepada *stakeholder* untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait kondisi di kawasan guna melengkapi data apabila data tidak diperoleh dari hasil kuesioner dan observasi. Wawancara dilakukan kepada *stakeholder* komunitas dan instansi pemerintahan di Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Perumdam Tirta Satria, Ketua Divisi

Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Ketua Divisi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.

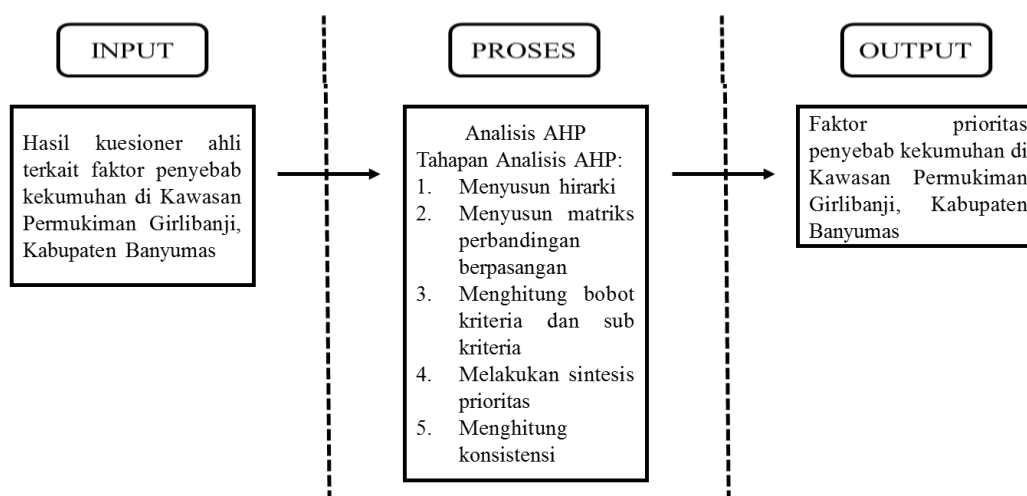
Tabel 2. Stakeholder Terpilih

Klasifikasi	Stakeholders	Jumlah	
Pemerintah (Government)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	9
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Permukiman Pengembangan Perumahan Penyehatan Lingkungan	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Perencanaan dan Pembangunan Jalan	
	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah	
	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan	
	Perumdam Tirta Satria		
Masyarakat (Community)	KOTAKU Banyumas		5
	Komunitas Masyarakat Peduli Sungai		
	BKM-PK (Badan Keswadayaan Masyarakat Peduli Kranji)		
	BKM Kedungwuluh BKM Bantarsoka		
Akademisi	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED		2
	Dosen Kesehatan Lingkungan Poltekkes Semarang		
<b>Total</b>			<b>16</b>

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data melalui instansi pemerintah dan lembaga terkait yang hasil publikasi datanya bersifat resmi. Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan data dari instansi pemerintahan di Kabupaten Banyumas seperti Bappedalitbang, Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan KOTAKU Kabupaten Banyumas.

### 3.2 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk menentukan *stakeholder* yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta mempertimbangkan tugas dan fungsi *stakeholder* yang berkaitan dengan faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji. AHP digunakan untuk menentukan bobot atau nilai masing-masing faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman untuk menentukan faktor prioritas. Kerangka analisis dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Hasil identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji diperoleh melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data melalui instansi-instansi pemerintah dan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data yang hasil publikasi datanya bersifat resmi. Karakteristik permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji diuraikan sebagai berikut.

#### 4.1.1 KONDISI SOSIAL BUDAYA

- a. Tingkat Pendidikan  
Tingkat pendidikan terakhir penduduk di Kawasan Girlibanji tergolong masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas (2023), Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang tamat pendidikan SMP/ sederajat ke bawah sebesar 68% penduduk atau 1.318 jiwa. Penduduk yang tamat pendidikan SMA/ sederajat sebesar 23% atau 439 jiwa, serta hanya terdapat 9% penduduk atau 171 jiwa yang lulus dari pendidikan tinggi. Keberagaman tingkat pendidikan ini mempengaruhi cara pandang dan pengetahuan penduduk terhadap permukiman khususnya kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan hunian.
- b. Jenis Pekerjaan  
Penduduk di Kawasan Girlibanji lebih banyak bekerja pada sektor nonformal. Penduduk lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti menjadi pedagang dan menjadi buruh/tukang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas (2023), diketahui bahwa 68% penduduk bekerja pada sektor nonformal.
- c. Migrasi Masuk  
Di Kawasan Girlibanji, jumlah penduduk yang bermigrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar. Hal ini dapat diketahui dari data BPS Kabupaten Banyumas (2023) yaitu terdapat 9 jiwa atau 60% penduduk yang bermigrasi masuk dan 6 jiwa atau 40% penduduk yang bermigrasi keluar.
- d. *Extended Family System*  
Pada Kawasan Girlibanji terdapat sedikit penduduk yang menganut *extended family system*. Penduduk yang menganut *extended family system* adalah penduduk yang memilih untuk menetap di rumah orang tua akibat belum mampu untuk menyewa/membeli hunian yang layak. Kawasan Girlibanji didominasi oleh hanya satu Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah yaitu sebanyak 69% atau 460 KK.
- e. Lama tinggal penghuni  
Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang telah menetap lebih dari 10 tahun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa permukiman di Kawasan Girlibanji terbentuk sudah sejak lama.

#### 4.1.2 KONDISI EKONOMI

Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Rata-rata pendapatan penduduk adalah kurang dari Rp1.500.000,00 per bulan. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Keterbatasan penghasilan diakibatkan semakin sulitnya mencari pekerjaan di daerah perkotaan, menjadikan masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri.

#### 4.1.3 KONDISI FISIK LINGKUNGAN

- a. Kepadatan dan kualitas bangunan  
Kawasan Girlibanji termasuk dalam kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan terdapat ketidakteraturan bangunan yang dipengaruhi oleh orientasi bangunan yang membelakangi sungai. Kondisi tersebut berdampak pada adanya pembuangan saluran limbah domestik dan pembuangan sampah langsung ke sungai. Selain itu, terdapat permasalahan ketidaksesuaian pembangunan bangunan yang melanggar garis sempadan sungai dan tidak pada lahan kepemilikan pribadi. Hampir semua bangunan permukiman di Kawasan Girlibanji memiliki pondasi tetapi terdapat bangunan yang memiliki kondisi rusak ringan hingga sedang seperti mengalami kebocoran pada atap saat hujan dan dinding serta lantai yang retak.

- b. Jaringan drainase  
Terdapat jaringan drainase primer berupa Kali Banjaran-Kranji yang berada di dalam kawasan. Kawasan Girlibanji didominasi oleh drainase tersier yang tertutup dan rata-rata memiliki kedalaman 30 cm dan lebar 30 cm. Semua drainase pada kawasan sudah menggunakan perkerasan berupa semen/cor dan *paving block* sehingga cukup optimal dalam mengalirkan limpasan air. Akan tetapi, masih terdapat beberapa jalan yang tidak dilengkapi jaringan drainase serta masih ada drainase yang kondisinya kurang baik dan tidak terawat dikarenakan tertimbun sampah dan dipenuhi oleh semak yang akhirnya menghambat aliran air.
- c. Jaringan air bersih  
Kawasan Girlibanji sudah terlayani oleh air bersih yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan juga air sumur. Air bersih pada kawasan memiliki kualitas air yang bersih dan jernih sehingga layak untuk dikonsumsi. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan terkait kondisi dan kualitas air bersih pada kawasan yaitu terdapat air sumur yang bau dan keruh sehingga masyarakat lebih banyak memilih menggunakan PDAM.
- d. Jaringan air limbah  
Jaringan air limbah pada Kawasan Girlibanji berupa jaringan pembuangan air hasil kegiatan domestik. Berdasarkan hasil observasi, telah ada jaringan pengelolaan limbah domestik tersendiri yang tidak menjadi satu dengan jaringan drainase, terutama limbah *grey water*. Untuk limbah *black water*, sebagian masyarakat sudah menggunakan tangki septik pribadi di dalam rumah dan sebagian masyarakat masih menggunakan tangki septik komunal atau langsung dibuang ke sungai. Berdasarkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022, terdapat 50 KK yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis (Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, 2016). Selain itu masih terdapat penduduk yang melakukan kegiatan mandi cuci kakus (MCK) pada toilet umum dan langsung dibuang ke Kali Banjaran-Kranji.
- e. Jaringan sistem persampahan  
Pada Kawasan Girlibanji, setiap rumah warga sudah difasilitasi dengan adanya tempat sampah pribadi tetapi sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di dalam kawasan sangat minim yang disebabkan oleh sempitnya lahan kosong. Hal tersebut menambah buruknya kondisi pengelolaan sampah di kawasan karena sampah rumah tangga menumpuk sehari-hari. Selain itu, Sebagian masyarakat memilih membakar sampah pada lahan kosong di sekitar rumah dan tidak mampu membayar iuran pengangkutan sampah.
- f. Jaringan jalan  
Cakupan pelayanan jalan lingkungan seluruh kawasan penelitian terlayani dengan cukup baik, baik pada jalan utama blok permukiman maupun pada gang-gang sempit. Meskipun demikian, masih ada beberapa rumah warga yang tidak mendapatkan akses jalan lingkungan untuk menuju ke rumah. Permukaan jalan lingkungan tertutup paving dan aspal dengan kualitas yang cukup baik tetapi terdapat jalan rusak di beberapa titik pada kawasan. Selain itu, kondisi jalan dengan lebar <1,5 meter hanya bisa diakses kendaraan roda dua sehingga kurang nyaman untuk wilayah dengan kepadatan tinggi dan semakin menghambat aksesibilitas masyarakat.

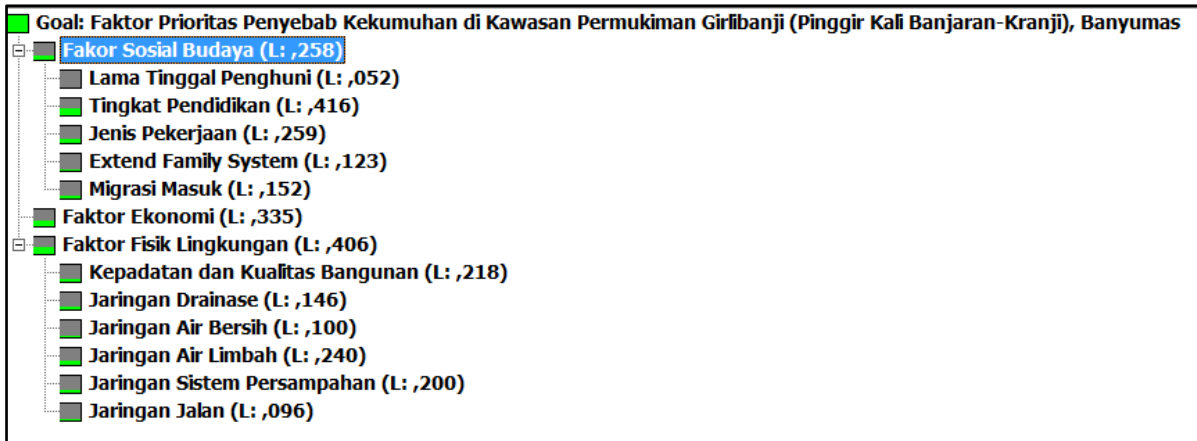
## 4.2 FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KEKUMUHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN

Analisis yang digunakan untuk menentukan faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji adalah analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Menurut Saaty (2008), analisis AHP bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan/prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisis perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria. Analisis AHP dapat menggabungkan penilaian berupa pemahaman, pengalaman, naluri, dan preferensi responden yang objektif dan logis. Dalam penelitian ini, analisis AHP dilakukan menggunakan *software* Expert Choice 11. Berikut ini diuraikan tahapan analisis analisis AHP.

### 4.2.1 Menyusun Hierarki Permasalahan

Tahapan ini berupa penyusunan tujuan penelitian sebagai fokus/sasaran utama, serta variabel dan subvariabel pada tingkatan berikutnya. Hierarki pertama dalam penelitian ini adalah faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji. Hierarki kedua adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor fisik lingkungan. Hierarki selanjutnya merupakan subvariabel dari variabel faktor sosial budaya dan faktor fisik lingkungan yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, *extended family system*, migrasi masuk, lama tinggal

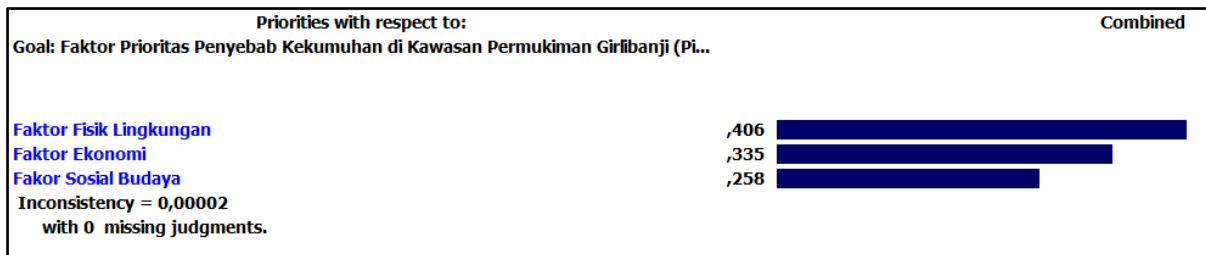
penghuni, kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan sistem persampahan, dan jaringan jalan. Bagan hierarki permasalahan penelitian ditunjukkan Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Hirarki Permasalahan

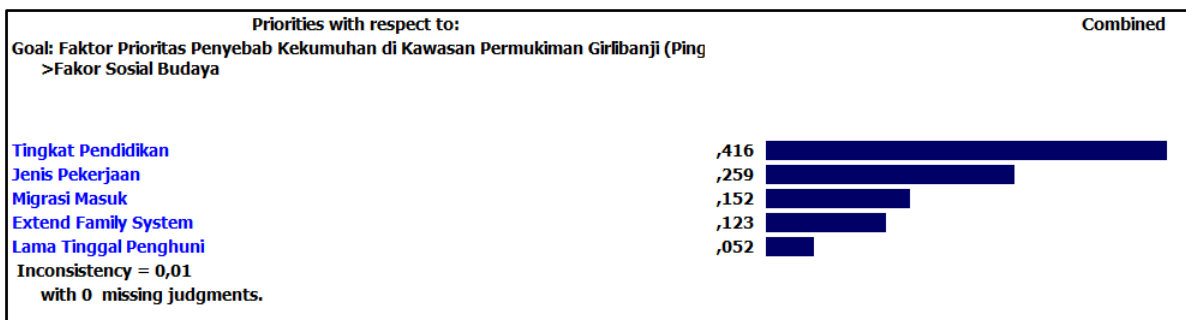
#### 4.2.2 Menentukan Prioritas Elemen-Elemen

Nilai-nilai perbandingan kriteria dari hasil kuesioner kepada responden kemudian diolah untuk menentukan prioritas faktor penyebab kekumuhan. Berdasarkan hasil *Consistency Ratio* (CR) hasil kuesioner, pertimbangan terhadap semua kriteria dianggap konsisten karena kurang dari 0,1, maka penilaian konsisten dan data dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Analisis AHP dilakukan untuk menentukan tingkatan faktor prioritas penyebab kekumuhan dan bobot prioritas faktor. Grafik tingkatan prioritas dan bobot nilai hasil analisis pada hierarki kedua dapat dilihat pada Gambar 3.



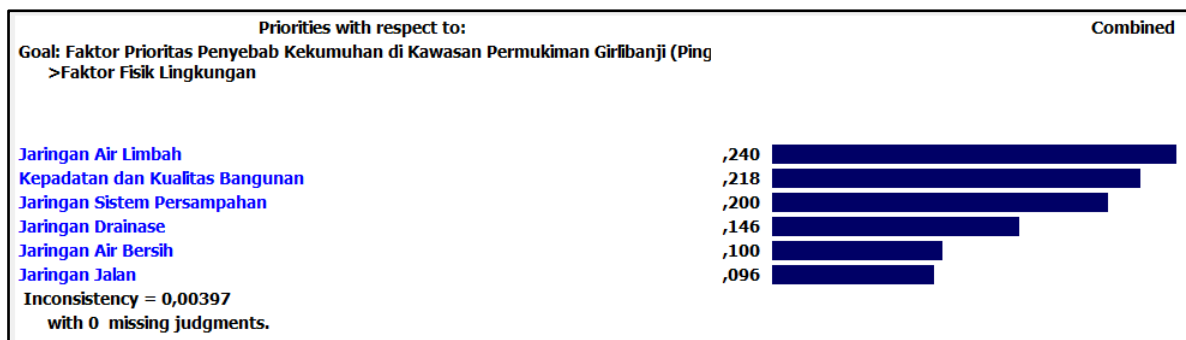
Gambar 3. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hirarki Kedua

Berdasarkan analisis AHP, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji adalah faktor fisik lingkungan yaitu sebesar 40,6%. Hal ini dikarenakan kawasan permukiman belum memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dan sesuai standar teknis. Faktor penyebab kekumuhan kedua adalah faktor ekonomi sebesar 33,5%. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas tergolong rendah. Faktor ketiga adalah faktor sosial budaya yaitu sebesar 25,8% yang diketahui dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, migrasi masuk, *extended family system*, dan lama tinggal penghuni. Setelah analisis AHP pada hierarki kedua, langkah selanjutnya adalah analisis AHP pada hierarki ketiga untuk mengetahui bobot tiap subvariabel dan bobot prioritas akhir. Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan grafik tingkat prioritas dan bobot nilai subvariabel faktor sosial budaya dan faktor fisik lingkungan.



Gambar 4. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hierarki Ketiga (Faktor Sosial Budaya)





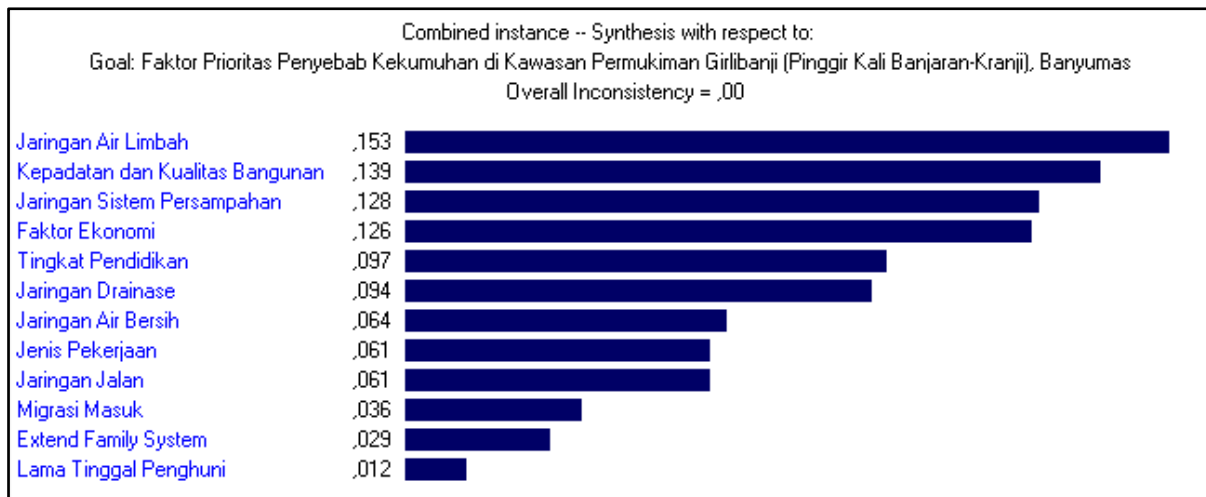
Gambar 5. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hierarki Ketiga (Faktor Fisik Lingkungan)

Selanjutnya, dilakukan sintesis akhir untuk memperoleh keseluruhan prioritas dari pertimbangan perbandingan berpasangan yang dilakukan. Menurut Saaty (2008), untuk menghindari masalah pembalikan peringkat, bobot masing-masing subvariabel harus dinormalisasi dengan menggunakan *ideal mode* dalam analisis AHP. Proses normalisasi diawali dengan membagi bobot masing-masing subkriteria dengan bobot subkriteria terbaik di bawah setiap kriteria untuk memperoleh bobot prioritas dalam hierarki ketiga. Kemudian, bobot masing-masing subkriteria dikalikan dengan bobot prioritas kriteria dan dibagi dengan total bobot prioritas akhir yang dinormalisasikan. Hasil akhir analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Akhir

Kriteria	Bobot Prioritas Kriteria (a)	Subkriteria	Bobot Prioritas Subkriteria	Ideal Mode (b)	Bobot Prioritas Akhir (a x b)	Normalisasi (Bobot Prioritas Akhir / Total Bobot Prioritas Akhir)	Peringkat
Faktor sosial budaya	0,258	Tingkat pendidikan	0,416	1,000	0,258	0,097	5
		Jenis pekerjaan	0,259	0,623	0,161	0,061	9
		Migrasi masuk	0,152	0,365	0,094	0,036	10
		Extended family system	0,123	0,29	0,076	0,029	11
		Lama tinggal penghuni	0,052	0,125	0,032	0,012	12
Faktor ekonomi	0,335	Tingkat pendapatan	1,000	1,000	0,335	0,127	4
Fisik lingkungan permukiman	0,406	Kepadatan dan kualitas bangunan	0,218	0,908	0,369	0,139	2
		Jaringan drainase	0,146	0,608	0,247	0,093	6
		Jaringan air bersih	0,100	0,417	0,169	0,064	7
		Jaringan air limbah	0,240	1,000	0,406	0,153	1
		Jaringan sistem persampahan	0,200	0,833	0,338	0,128	3
		Jaringan jalan	0,096	0,400	0,162	0,061	8
<b>Total</b>					<b>2,648</b>	<b>1,000</b>	

Setelah melalui proses normalisasi, tingkatan faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman akan sama dengan output Expert Choice 11. Hasil sintesis akhir di Expert Choice 11 dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan analisis AHP yang dilakukan, sangat memungkinkan peneliti mengambil lebih dari satu faktor prioritas karena dalam metode analisis AHP tidak memberikan suatu batasan pengambilan faktor prioritas. Oleh karena itu, dalam pertimbangan perumusan faktor prioritas, peneliti menggunakan asumsi bahwa setiap faktor berbobot sama penting apabila memiliki bobot prioritas akhir yang sama besar. Setiap faktor prioritas diasumsikan mempunyai prioritas yang sama apabila memiliki bobot nilai minimum sama dengan 0,083 sehingga faktor yang dikelompokkan dalam faktor prioritas adalah faktor yang memiliki bobot prioritas akhir lebih dari 0,083.



Gambar 6. Hasil Sintesis Akhir di Expert Choice 11

Berdasarkan perhitungan analisis AHP terhadap 12 faktor penyebab kekumuhan dengan pertimbangan batas minum rata-rata bobot prioritas akhir setiap faktor maka dapat dihasilkan 6 faktor prioritas. 6 faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji

Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan	Bobot Prioritas Akhir	Persentase Bobot Prioritas Akhir	Peringkat
Jaringan air limbah	0,153	15,3%	1
Kepadatan dan kualitas bangunan	0,139	13,9%	2
Jaringan sistem persampahan	0,128	12,8%	3
Tingkat kepadatan	0,126	12,6%	4
Tingkat pendidikan	0,097	9,7%	5
Jaringan drainase	0,094	9,4%	6

Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa faktor prioritas yang menyebabkan kekumuhan di Kawasan Girlibanji adalah faktor jaringan air limbah. Hal tersebut selaras dengan tinjauan literatur yang dikemukakan oleh Hariyanto (2007), Crysta & Budisusanto (2017), Asa (2015), dan Damisi et al. (2014) bahwa faktor fisik lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan kekumuhan yang diketahui dari rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah. Mayoritas masyarakat di kawasan permukiman kumuh kurang sadar tentang pentingnya ketersediaan MCK dan masih terdapat masyarakat yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. Faktor prioritas kedua adalah kepadatan dan kualitas bangunan. Menurut Wimardana & Setiawan (2016), Arung & Ulimaz (2021), dan Muvidayanti & Sriyono (2019) satu faktor yang menyebabkan kekumuhan di kawasan permukiman adalah kualitas bangunan dan kualitas material bangunan tersebut. Kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh cenderung termasuk dalam tingkat kepadatan tinggi, jarak antar rumah hampir tidak ada dengan luasan rumah yang relatif kecil.

Faktor prioritas ketiga adalah jaringan sistem persampahan. Sejalan dengan literatur dari Magfirah (2022), Damisi et al. (2014), dan Hariyanto (2007), salah satu faktor penyebab permukiman kumuh adalah faktor fisik lingkungan yang dilihat dari kondisi sarana dan prasarana persampahan dan belum adanya pengelolaan sampah yang baik mengakibatkan adanya tumpukan sampah di pekarangan. Jaringan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Faktor prioritas keempat adalah tingkat pendapatan. Mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang rendah di Kawasan Girlibanji selaras dengan teori dari Surtiani (2006), Ismail, Sriartha, & Sutarjo (2016), Apriliani et al. (2022), dan Istikasari & Khadiyanto (2014), bahwa tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan tidak mampu untuk memperbaiki bangunan hunian.

Faktor prioritas kelima adalah tingkat pendidikan. Mayoritas masyarakat di kawasan permukiman kumuh memiliki tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab kekumuhan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan permukiman (Fitri & Sulistinah, 2021; Hariyanto, 2007; Putra & Andriana, 2017; Zulkarnaini et al., 2019). Faktor prioritas keenam adalah jaringan drainase. Jaringan drainase di Kawasan Girlibanji sebagian besar hanya berada pada satu sisi jalan, terdapat beberapa jalan yang

tidak dilengkapi jaringan drainase, serta masih ada drainase yang kondisinya kurang baik dan tidak terawat. Hal tersebut sesuai dengan tinjauan literatur oleh Afrina, Fuady, & Yusuf (2021), Hariyanto (2007), Yustika & Umilia (2019), serta Apriliani et al. (2022) bahwa kondisi saluran drainase menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekumuhan karena banyaknya sampah yang berada di saluran drainase yang dapat menyumbat aliran air dan jaringan drainase terbilang sempit dan kecil serta sangat dekat dengan perumahan warga.

## 5. KESIMPULAN

Faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari faktor fisik lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor fisik lingkungan terdiri atas kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan air limbah, jaringan air bersih, jaringan sistem persampahan, jaringan drainase, dan jaringan jalan. Faktor sosial budaya terdiri atas tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, migrasi masuk, *extended family system*, dan lama tinggal penghuni. Faktor ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan penduduk. Berdasarkan hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dilakukan, terdapat enam faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas. Keenam faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji dari yang paling berpengaruh berturut-turut adalah: (1) jaringan air limbah; (2) kepadatan dan kualitas bangunan; (3) jaringan sistem persampahan; (4) tingkat pendapatan; (5) tingkat pendidikan; serta (6) jaringan drainase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrina, S., Fuady, Z., & Yusuf, M. A. (2021). Identifikasi Faktor Penyebab Utama Kekumuhan Permukiman di Dusun Tengku Muda, Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 5(2), 58–64. Diakses dari: <https://jim.usk.ac.id/ArsitekturPWK/article/view/17874>
- Akbar, M. A. (2020). *Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan Berdasarkan Tipologi Kawasannya*. Institut Teknologi Kalimantan.
- Apriliani, D., Heldayani, E., Utomo, B., & Setianto, H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Tuan Kentang Kota Palembang. *RUAS: Review of Urbanism and Architectural Studies*, 20(2), 73–84. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7>
- Arung, R., & Ulimaz, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 472–481. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.37953>
- Asa, D. M. (2015). *Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Pengungrejo Kota Pasuruan*. Insitut Teknologi Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035. Diakses Juli 12, 2023, dari website Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2023*. Banyumas: BPS Kabupaten Banyumas.
- Crysta, E. A., & Budisusanto, Y. (2017). Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), C389–C393. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24173>
- Damisi, D. M., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). *Jurnal Sabua*, 6(1), 163–172. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/5282>
- Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. (2016). *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Banyumas*. Diakses dari: <https://drive.google.com/file/d/1xB9hkXTI5DTHtVyXsdjKpjUZmvFrh1hF/view?pli=1>
- Fitri, D. A., & Sulistinah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Swara Bhumi*, 1(1), 1–9. Diakses dari: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202>
- Hariyanto, A. (2007). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Unisba*, 7(2). Diakses dari: <https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/pwk/article/view/17761>
- Ismail, R. M. M. A., Sriartha, I. P., & Sutarjo. (2016). Kajian Permukiman Kumuh di Kota Singaraja. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 4(3). Diakses dari: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/20561>
- Istikasari, M., & Khadiyanto, P. (2014). Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi. *Ruang*, 2(4), 301–310.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Lestari, I. D., & Sugiri, A. (2013). Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Podosugih, Kota Pekalongan. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 2(1), 30–41. Diakses dari:

- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/1406>
- Magfirah, A. (2022). *Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*. Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia.
- Muvidayanti, S., & Sriyono. (2019). Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Geo Image*, 8(1), 37–44. Diakses dari: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage/article/view/29658>
- Nawagamuwa, A., & Viking, N. (2003). Slums, Squatter Areas and Informal Settlements—Do They Block or Help Urban Sustainability in Developing Contexts? *Proceedings of the 9th International Conference on Sri Lanka Studies*. Matara.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2020). *Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660/630 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas*.
- Putra, K. E., & Andriana, M. (2017). Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan. *Jurnal Koridor*, 8(2), 97–104. <https://doi.org/10.32734/koridor.v8i2.1334>
- Putro, J. D. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1). <https://doi.org/10.26418/jtsft.v11i1.1066>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Who's In and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Robaka, C. Y. V. (2019). *Penentuan Prioritas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Bentuk Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar*. Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Malang, Indonesia.
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Sekatia, A. (2015). Kajian Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok Semarang (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat). *Modul*, 15(1), 57–66. Diakses dari: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/view/10736>
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Surtiani, E. E. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*. Tesis, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Wiarni, S., Mononimbar, W., & Supardjo, S. (2018). Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. *Spasial*, 5(1), 61–70. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19095>
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>
- Wimardana, A. S., & Setiawan, R. P. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), C166–C171. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18386>
- Yustika, F. N., & Umilia, E. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), C189–C193. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48986>
- Zulkarnaini, W. R., Elfindri, & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*, 16(2), 169–188. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047>